

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena diyakini lewat proses pendidikan akan terjadi aktivitas pemanusiaan manusia. Pendidikan merupakan sebuah potensi besar yang dimiliki oleh manusia untuk ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi manusia yang sebenarnya. Hal ini jelas, bahwa manusia yang sebenarnya manusia adalah hasil dari proses pendidikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nahl/16 :44, berbunyi:¹

يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لَشُبِّينَ الذِّكْرِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan bagi seseorang di kemudian hari, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun bangsa. Untuk itulah, perlu peningkatan mutu pendidikan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia berperan penting dalam pendidikan. Melalui ketetapan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. h. 408

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”²

Sebelum lahirnya undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, terlebih dahuluberlaku undang-undang No. 02 tahun 1989. Adanya perubahan undang-undang ini merupakan komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan. Berdasarkan kebijakan pemerintah ada 5 (lima) hal yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan di Indonesia masih berada di bawah mutu pendidikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga lulusannya belum diakui secara internasional, dan karenanya mereka tidak memiliki akses, serta tidak mampu bersaing di pasaran global yang semakin kompetitif.
2. Pendidikan di Indonesia belum terlaksana secara merata kepada seluruh masyarakat, terutama dari golongan keluarga kurang mampu/miskin.
3. Pendidikan di Indonesia belum dapat membelajarkan masyarakat, sehingga tidak dapat mewujudkan konsep masyarakat belajar (*learning society*) dan konsep belajar seumur hidup (*long life education*).
4. Pendidikan di Indonesia masih belum terkait dan sesuai (*link and mach*) dengan dunia usaha dan industri, sehingga tamatan pendidikan tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia, dan pada gilirannya menimbulkan para penganggur.
5. Pendidikan di Indonesia masih belum mampu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia para lulusannya, sebagai akibat dari belum efektifnya pelaksanaan pendidikan agama, akhlak mulia, dan budi pekerti.³

Kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab I, pasal 1, no 1,” dalam *Undang-Undang*

³Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45-46.

Indonesia (NKRI).⁴ SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat.⁵ SNP merumuskan standar isi (kurikulum), proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.⁶ Standar-standar inilah yang menjadi acuan dasar dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran mutu yang tidak seimbang antar daerah.

Untuk mencapai mutu pendidikan, maka seluruh sumber daya pendidikan yang ada perlu dikelola dan diberdayakan secara maksimal, sumber daya pendidikan berupa sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan keuangan (pembiayaan) perlu diorganisir, dikoordinir, dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru, agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah memerlukan adanya standar nasional bidang pendidikan.

⁴Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Bab I, pasal 1, no 1,”

⁵Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 ..., Bab II, pasal 4.

⁶Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005..., Bab II, pasal 2.

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merelokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.⁷

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat penting mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada pada Lembaga Pendidikan Islam (LPI). Termasuk didalamnya pengelolaan pembiayaan sebagai jantung jalannya pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan faktor yang sangat penting keadaannya. Dikarenakan tanpa biaya pendidikan, maka proses pendidikan akan sulit berjalan. Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan tentu diperlukan pengelolaan biaya pendidikan yang baik, agar terpenuhi mutu pendidikan yang sesuai standar pembiayaan pendidikan dari peraturan pemerintah.

Pembiayaan mempunyai peran yang signifikan dalam sebuah lembaga, termasuk di lembaga pendidikan. Mujamil Qomar (2008) mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada pembiayaan, yaitu: *Pertama*, pembiayaan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan menjadi gagal dan berantakan manakala

⁷Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.185.

tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai; dan *kedua*, lazimnya pembiayaan itu sulit sekali didapatkan dalam jumlah yang besar khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.⁸

Terkait dengan implementasi pengelolaan pembiayaan ini. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Furqaan/25 : 2, berbunyi:⁹

لَمْ يَلِكْ فِي شَرِكِهِ، يَكُنْ وَلَمْ يَلِكْ وَلَمْ يَلِكْ وَلَمْ يَلِكْ
تَقْدِيرًا فَقَدَرَهُ شَيْءٌ كُلُّ وَحْدٍ

Dalam melaksanakan amanat pendidikan, setiap proses harus diikuti dengan baik dan rapi, tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantab, peraturan yang sesuai harapan, cara mendapatkan biaya yang baik, dan cara penggunaan biaya yang transparan akan menjadi amal/perbuatan yang diridhai dari Allah Swt.

Sebagai teladan bagi umat Islam yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw., pada masa beliau sudah ada yang dinamakandengan pembiayaan terhadap pendidikan. Pembiayaan digunakan untuk kegiatan majelis ilmu dan tempat ibadah di berbagai pelosok daerah oleh para sahabat Nabi Saw. guna kepentingan perkembangan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Abuddin Nata dalam (Baharuddin & Moh. Makin, 2010) bahwa: “Pembiayaan pendidikan masa itu berasal

⁸Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 150-151.

⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. h.

dari subsidi pemerintah, yang berasal dari *jizyah*, *kharaj*, dan zakat”. Juga disampaikan oleh Abdullah dalam (Baharuddin & Moh. Makin, 2010) bahwa bentuk pemasukan masa itu dapat berupa pajak tanah, pajak tanah, dan harta rampasan perang (*ghanimah*).¹⁰

Selain itu, sejarah Islam juga mencatat banyak sekali karya-karya yang monumental dari para ilmuwan. Diantaranya: Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Ibnu Atha’illah, Imam Syafi’i, Imam Ghazali, dan lain-lain. Mereka sebagai bukti tokoh-tokoh yang produktif dalam pendidikan Islam.

Kepedulian Islam terhadap dunia pendidikan juga telah ditunjukkan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu adanya keputusan bahwa:

“Barang siapa diantara kalian yang secara rutin mengumandangkan adzan di wilayah kalian, maka catatlah pemberian sebesar 1000 dinar. Siapapun yang telah tekun menuntut ilmu, dan rajin meramaikan majelis-majelis ilmu dan tempat pendidikan berhak memperoleh 1000 dinar. Siapa saja yang menghafal Al Qur’an, meriwayatkan Hadits dan mendalami ilmu syari’at Islam berhak atasnya 1000 dinar”.¹¹

Sejak abah ke IV H, para khalifah telah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan sarana prasarana, seperti perpustakaan, “*iwan*” (auditorium), asrama, dan perumahan beserta fasilitasnya. Selain itu, pada masa Khalifah Usmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fathi (1481 M), juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di konstantinopel (Istanbul), Sultan membangun 8 (delapan) sekolah, dilengkapi dengan asrama lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk peserta didik. Juga dibangun perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu.

¹⁰Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam; Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*(Malang: UIN-MALIKI PERS, 2010),h. 137.

¹¹Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen...*, h.136.

Dari gambaran sejarah, sangat jelas bahwa pembiayaan selalu ada di setiap zamannya. Pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari hal apa saja, lebih-lebih dalam dunia pendidikan, pembiayaan menjadi unsur penting atas terlaksananya. Demi tercapai kualitas (mutu) pendidikan yang lebih baik, tentunya biaya harus lebih ditingkatkan untuk mencapai kenyamanan dan kesejahteraan semua elemen terkait dalam pendidikan.

Pentingnya pembiayaan dalam mencapai mutu pendidikan sangat banyak dibahas oleh para ahli pendidikan. Dalam penelitiannya I Nyoman Natajaya (2003) menjelaskan bahwa: *“Cost factor is very important in effort to increase the quality of education. The bigger cost of education will guarantee to increase the quality of education will be bigger, too”*.¹² Dijelaskan bahwa, faktor biaya berpengaruh penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Biaya pendidikan yang lebih besar akan lebih menjamin peningkatan mutu pendidikan yang lebih besar pula”.

Menurut Edgar C. Morphet dalam Ahmad Arifi (2008) bahwa: “biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan, manajemen pendidikan, dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan”.¹³ Hal yang sama juga dipaparkan oleh Baharuddin dan Moh. Makin (2010) bahwa: ”biaya dan bagaimana

¹²I Nyoman Natajaya, “Faktor Biaya sebagai Masukan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 1 TH. XXXVI, ISSN 0215-8250, (2003): h. 1.

¹³Ahmad Arifi, “Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan”. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. V, No. 1, (2008): h. 118.

manajemennya merupakan cerminan dari kualitas (mutu) pendidikan.¹⁴ Jelaslah bahwa semakin besar biaya pendidikan dan semakin baik manajemennya, maka akan semakin tinggi mutu pendidikan.

Sebuah penelitian di Erofa yang dilakukan oleh William E. Ekpiken (2013), menyebutkan bahwa:

*“Unit variable cost of education vary with changes in the number of student enrolments and it is a good measure of effective cost of education. Therefore, this study explored unit cost of education as a determinant of students’ learning achievement in universities in Cross River State of Nigeria. It was designed to provide a baseline information for policy-planning on education in order to enhance internal efficiency in the university system”.*¹⁵

Dalam penelitiannya dijelaskan biaya satuan pendidikan merupakan penentu prestasi belajar siswa di lembaga pendidikan di Cross River State Nigeria. Biaya pendidikan dijadikan sebagai informasi untuk kebijakan perencanaan pendidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi internal pada sistem sekolah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hanushek dalam Uhar Suharsaputra (2013), *“studies of educational production function (also referred to as input-output analysis or cost-quality studies) examine the relationship among the different inputs into the educational process and outcomes of the proses”.*¹⁶ Dijelaskan bahwa biaya dipandang sebagai faktor *input* yang memberi kontribusi pada proses pendidikan dalam membentuk/mempengaruhi mutu pendidikan (*output*).

¹⁴Baharuddin dan Moh. Makin, ..., h. 152.

¹⁵William E. Ekpiken. “Unit Cost Of Education As A Determinant Of Students’ Learning Achievement In Universities In Cross River State Of Nigeria”. Nigeria: University of Calabar, Vol. 2, No. 3, pp 10-16, (2013), h. 10.

¹⁶Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung; PT. Refika Aditama, 2013), h. 306.

Dalam penelitian Akhmad Fathurrohman, dkk (2014) bahwa: “terdapat banyak masalah yang ditemukan dalam pembiayaan pendidikan, seperti: rendahnya dukungan biaya pendidikan dari dunia usaha dan industri serta perusahaan asing, adanya keterlambatan pencairan dana, kebutuhan biaya sarana prasarana dan kurikulum yang tinggi, dan pencapaian standar pembiayaan yang minimalis.”¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wiko Saputra, Ayu Yuliana Tasya, dan Jorrie Andrean (2015) bahwa:

“Dalam menghadapi Millenium Development Goals 2015, pendidikan di Indonesia harus berbenah diri, hal utama yang dilakukan adalah memperbaiki program wajib belajar sembilan tahun dan secara bertahap mencanangkan program wajib belajar dua belas tahun.”¹⁸

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia berbenah diri untuk memperbaiki mutu yang lebih baik. Bukan hanya perencanaan pendidikan yang berjangka pendek, tetapi perlu perencanaan pendidikan yang berjangka panjang untuk peningkatan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mutu pendidikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh W. Edwards Deming (1986). Teori Deming sebagai suplemen yang memberikan pengembangan terhadap mutu pendidikan (sekolah). Mengapa peneliti memilih teori Deming ini? Alasannya, teori ini tidak hanya terbukti menjadi kontributor sukses dalam mengubah industri Jepang dari menghasilkan produk standard yang rendah menjadi sangat produktif, bahkan untuk produk kelas dunia (Juran, 1993); juga, selama tahun 1980-an dan 1990-an teori ini memberikan

¹⁷Akhmad Fathurrohman, dkk., “Analisis Deskriptif Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2012”. Blora: JKPM, , Vol. 1 No. 01,(2014), h. 1.

¹⁸Wiko Saputra, Ayu Yuliana Tasya, dan Jorrie Andrean. “Millenium Development Goals 2015”. Padang: Universitas Andalas PKMI-2-1-1, (2015), h. 1.

kontribusi positif dalam membantu perubahan bagi beberapa pemimpin perusahaan bisnis Amerika dari produk yang gagal menjadi produk unggulan (Allaire, 1990; Howard, 1992; Kerns & Nadler, 1992; Walton, 1986).¹⁹ Dari pemikiran Deming dapat memberikan pencerahan dan petunjuk yang jelas. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dan tentu saja dapat diterapkan dalam pendidikan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh para pakar pendidikan menerapkan teori industri tersebut dalam pendidikan. Walaupun pendidikan dan industri berbeda, beberapa proses dasar ternyata sama. Adapun yang membedakannya adalah pendidikan tidak kompetitif dan objeknya tidak untuk mencapai keuntungan. Berdasarkan teori Deming inilah, implementasi konsep mutu dalam sebuah lembaga pendidikan memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen, yaitu empat belas (14) butir pemikirannya guna peningkatan mutu pendidikan (sekolah).

Empat belas (14) butir pemikiran tentang peningkatan mutu suatu organisasi yang diusulkan Deming diharapkan dapat diterapkan dalam upaya peningkatan mutu manajemen pendidikan di Indonesia. Dari keempat belas butir pemikiran Deming tersebut, unsur kepemimpinan merupakan unsur utama.²⁰ Oleh karena itu, Indonesia harus lebih serius mempersiapkan pemimpin yang cerdas dan berkualitas sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan.

¹⁹Svein Stensaasen, "The application of Deming's theory of total quality management to achieve continuous improvements in education". Norway: *Journals Oxford Ltd University of Oslo, Institute for Educational research* (1995), Vol. 6 NOS 5 & 6, h. 581.

²⁰Theresia Kristiaty, "Peningkatan Mutu Pendidikan Cara Deming". *Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur (Universitas Negeri Jakarta)*, NO. 04/Th.IV/Juli 2005, h. 106.

Empat belas (14) teori deming merupakan kombinasi filsafat baru tentang mutu dan seruan terhadap manajemen untuk merubah pendekatannya. Dia mengkombinasikan konsep tersebut mulai dari wawasan psikologis sampai pada kendala-kendala dalam mengadopsi kultur mutu (*quality culture*). Pendekatan mencegah lebih baik dari pada mengobati, merupakan kontribusi unik Deming dalam memahami bagaimana cara menjamin pengembangan mutu.²¹

Jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, menurut Deming ada 5 penyakit yang menghambat mutu pendidikan untuk memunculkan pemikiran baru. Kelima penyakit tersebut adalah kurang konstannya tujuan, pola pikir jangka pendek, evaluasi prestasi individu melalui proses penilaian atau tinjauan kerja tahunan, rotasi kerja yang terlalu tinggi, dan manajemen yang menggunakan prinsip angka yang tampak.²² Dapat dikatakan bahwa rata-rata pendidikan Indonesia mengidap 5 penyakit tersebut sehingga perlu penanganan yang serius dengan mengadopsi obat ampuh yaitu, 14 butir teori Deming.

Demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, sebuah Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dengan nama Yayasan Citra Babur Rahman (YCBR) Kota Citra Graha Banjarbaru memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan, di antaranya adanya pembangunan SMP Plus CMIBanjarbaru. Sekolah yang masih mudaini, sudah mampu bersaing dengan sekolah yang lain dan mendapat anemo masyarakat yang tinggi. Hal ini tentu menarik untuk dijadikan kajian, bagaimanakah pengelolaan biaya pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan?

²¹Edward Sallis, *Total Quality Manajement In Education*, diterjemahkan oleh Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, (Jogyakarta: IRCiSod, 2008), h. 97.

²²Edward Sallis, *Total ...*, h. 98-100.

Sekolah yang berlokasi di kompleks Citra Graha Banjarbaru ini sangat memprioritaskan pelayanan, khususnya layanan keamanan dan kenyamanan kepada siswa. Juga diisi oleh para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih muda dan energik yang telah ditunjuk oleh yayasan melalui Forum Penjamin Mutu Sekolah (FPMS). Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan, tentu semuanya perlu biaya yang tidak sedikit. Hal ini menantang peneliti untuk melakukan kajian secara terperinci dan mendalam.

Dari berbagai permasalahan dan pendapat di atas, pemenuhan biaya pendidikan di SMP Plus CMI Banjarbaru tidak terlepas dari perencanaan dan pengelolaan pembiayaan yang terstruktur, baik dan teratur, untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Dengan alasan inilah, penulis tertarik mengkaji penelitian tentang **“Pengaruh Biaya Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah :

1. Berapa besar biaya pemasukan pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
2. Berapa besar biaya pengeluaran (*total cost*) pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
3. Berapa besar biaya satuan (*unit cost*) persiswadi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
4. Bagaimana biaya pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?

5. Bagaimana mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
6. Apakah terdapat pengaruh biaya investasi pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
7. Apakah terdapat pengaruh biaya operasi pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?
8. Apakah terdapat pengaruh biaya investasi dan operasi pendidikan secara simultan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui:

1. Biaya pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.
2. Mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.
3. Pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan menambahkan bahan kajian, khususnya mengenai biaya pendidikan dan mutu pendidikan bagi para pengembang ilmu dan pengetahuan secara akademik, selanjutnya dapat mengaplikasikannya dalam memenuhi pencapaian standar nasional pendidikan

(SNP), serta menelaah pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, untuk:

- a. Memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi atas alokasi dan perhitungan biaya pendidikan di kota Banjarbaru.
- b. Memberikan masukan kepada SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru mengenai hasil rekapitulasi pengelolaan biaya pendidikan sebagai pedoman dalam menghitung kebutuhan siswa untuk tahun berikutnya dan mendeskripsikan mutu pendidikan sebagai informasi untuk peningkatan mutu pendidikan kedepan.
- c. Memberi masukan kepada masyarakat, yaitu orang tua siswa, komite sekolah, pemerhati pendidikan. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran besaran biaya pendidikan dan informasi mengenai biaya dan mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat menyikapi dengan bijak terhadap permasalahan pembiayaan dan berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.
- d. Memberi masukan kepada para akademisi, bahwa penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dikemukakan diatas terdapat 3 hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. H_a = Terdapat pengaruh biaya investasipendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh biaya investasipendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

2. H_a = Terdapat pengaruh biaya operasi pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh biaya operasi pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

3. H_a = Terdapat pengaruh biaya investasi dan operasipendidikan secara simultan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh biaya investasi dan operasi pendidikan secara simultan terhadap mutu pendidikan di SMP Citra Plus Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

F. Asumsi Penelitian

Biaya merupakan hal yang harus ada dalam pendidikan, tanpa biaya maka sulit melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Biaya sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, biaya pendidikan yang tinggi cenderung akan menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, biaya pendidikan yang rendah cenderung akan menghasilkan mutu pendidikan yang rendah pula. Oleh karena itu, biaya sangat berperan penting dalam melaksanakan dan pencapaian mutu pendidikan terutama di lokasi penelitian, yaitu di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

G. Definisi Operasional dan Pembatasan Masalah

Agar pemahaman lebih terarah, maka peneliti menjelaskan definisi operasional yang akan dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh adalah suatu keadaan adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Pengaruh berupa daya yang dapat menjadikan sesuatu berubah. Jika ada pengaruh yang menjadikan sesuatu itu berubah, maka ada akibat yang ditimbulkannya.
2. Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua siswa maupun masyarakat dalam bentuk uang, barang, tenaga atau pengorbanan peluang yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
3. Mutu pendidikan adalah hasil produk dan layanan yang semakin baik dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan. Dengan mutu bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang tepat dalam lembaga pendidikan.

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan berlaku selama 1 tahun pelajaran 2015/2016.
2. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi.
3. Pembahasan mutu pendidikan berdasarkan penerapan “Teori Deming” di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2009) tentang pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa nilai pengaruh langsung biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar menunjukkan nilai negatif, akan tetapi biaya pendidikan berpengaruh positif terhadap mutu hasil belajar melalui intervening variabel mutu proses belajar mengajar.²³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suhirman (2011) tentang pengaruh biaya pendidikan terhadap hasil belajar melalui proses belajar mengajar di SMA Negeri se-kabupaten Rembang tahun 2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar sebesar 34,1%. Pengaruh biaya pendidikan terhadap hasil belajar merupakan pengaruh tidak langsung yaitu melalui proses belajar mengajar yaitu sebesar 47,8%. Pengaruh biaya pendidikan terhadap hasil belajar melalui proses belajar mengajar secara simultan mempunyai pengaruh positif dan sebesar 60,4%.²⁴

²³Syamsudin, "Pengaruh biaya Pendidikan terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan". (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009).

²⁴Suhirman, "Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Melalui Proses Belajar Mengajar Di Sma Negeri Se-Kabupaten Rembang Tahun 2011", *Journal Of Economic Education Pascasarjana Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, JEE 1 (2) (2012): h. 117.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Khairani Z (2012) tentang strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen keuangan di MTsN 1 rantau dan MTsN 2 Rantau kabupaten Tapin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa unsur manajemen yang kurang sempurna seperti pembukuan keuangan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan manajemen keuangan pada kedua sekolah tersebut, yaitu sumber daya manusia, pembiayaan, dan beban kerja.²⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Jennah (2014) bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Anggaranbiaya pendidikan setiap madrasah di mulai dengan adanya penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) setiap tahun. Alokasi anggaran terbesar untuk memenuhi gaji pegawai dan anggaran terkecil untuk meningkatkan kompetensi guru, sedangkan anggaran untuk sarana sekolah, pengelolaan dan kegiatan kesiswaan berbeda antara masing-masing sekolah; (2) Dana yang diberikan diberikan oleh pemerintah ataupun yayasan disalurkan langsung ke rekening madrasah, selanjutnya dana itu digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam RKAS/M; dan (3) Setiap madrasah bertanggungjawabkan seluruh penggunaan pembiayaan pendidikan kepada pemerintah.²⁶

²⁵Eddy Khairani Z, "Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen keuangan di MTsN 1 rantau dan MTsN 2 Rantau kabupaten Tapin." (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012).

²⁶Noor Jennah, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Studi Kasus pada Jenjang Pendidikan Menengah)." (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

5. Penelitian yang dilakukan oleh H. Sulhan (2014) tentang manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren (Studi multi situs pada Pondok Pesantren Salafi se-kabupaten Hulu Sungai Selatan). Temuan dari penelitiannya adalah: (1) Manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi: perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban masih belum seragam atau belum rapi dan masih perlu penyempurnaan, seperti dalam membuat perencanaan hanya dibuat untuk jangka pendek saja, pengelolaan dana masih belum berhasil dan belum mampu untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren, pertanggungjawaban hanya pada dana yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan sumber lain masih belum terlaksana; (2) Strategi pimpinan pondok pesantren dalam manajemen pembiayaan pendidikan dengan cara: penggalangan dana secara kekeluargaan, menjalin hubungan silaturahmi dengan berbagai pihak. Pengelolaan dana juga dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pelayanan jasa, dan lain-lain. Dalam pertanggungjawaban keuangan dibuat menyesuaikan panduan atau juklis yang ada, khususnya berkenaan dengan dana BOS walaupun kenyataannya direkayasa.²⁷

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian banyak membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan secara kualitatif dan pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar, tentu masih banyak hal lain yang perlu digali dari biaya pendidikan. Diantara hal yang belum tersentuh, yaitu penelitian yang mengkaji secara parsial dan simultan pengaruh biaya pendidikan (ditinjau dari Standar

²⁷H. Sulhan, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Pondok Pesantren (Studi Multi Situs pada Pondok Pesantren Salafi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)." (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

Nasional Pendidikan / SNP di Indonesia) terhadap mutu pendidikan (teori mutu yang dikemukakan oleh W. Edwards Deming) dengan mengambil lokasi di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru. Bagi peneliti, penelitian ini menarik dan menantang untuk dilakukan, guna menambah referensi pengetahuan dan informasi bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dan tiap bab memiliki pola sub bab seperti berikut ini:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka, bab ini menyajikan kajian tentang biaya pendidikan, mutu pendidikan, hubungan biaya dan mutu pendidikan.

Bab III adalah metode penelitian yang membahas tentang jenis dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah paparan data hasil penelitian, yakni penyajian data dan analisis statistik tentang pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi (CMI) Banjarbaru.

Bab V adalah pembahasan mengenai data-data penelitian dengan cara menganalisis data yang diperoleh berdasarkan 3 aspek, yaitu kajian teoritis, kajian empiris, dan implikasi hasil penelitian.

Bab VI adalah penutup, bab terakhir dari laporan penelitian yang terdiri dari simpulan, hasil implikasi, dan dilengkapi dengan saran-saran.